



BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

A. Kajian Konseptual Tentang Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Ife sebagaimana dikutip Edi Suharto, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini di artikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik dalam arti sempit, melainkan atau kekuasaan atau penguasaan klien atau pilihan pilihan personal dan kesempatan hidup, pendefinisian kehidupan, ide atau gagasan, lembaga lembaga, sumber sumber, aktifitas ekonomi, dan reproduksi.¹⁴

Didalam ajaran islam memandang bahwa pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif islam.¹⁵

Pemberdayaan merupakan suatu supaya untuk mengenal, memahami kebijakan dan memanfaatkan kekuatan, menyelidiki proses-proses dimana

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 59.

¹⁵ Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Syaferi, *Pengembangan Masyarakat Islam...* hal. 42.



masyarakat dapat mengatur atau menguasai kehidupan, dalam masyarakat, termasuk mengubah kekuatan itu.¹⁶

Keberdayaan dalam konteks masyarakat juga bisa di pahami yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ,dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁷

Memberdayakan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat ”*People centered, participatory, empowering, and sustainable*”¹⁸

Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keperdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial.¹⁹

¹⁶ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan...* hal. 79

¹⁷ Abdul Basyid, *Pemberdayaan Masyarakat dalam El Ijtima'...* hal.57

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Syaferi, *Pengembangan Masyarakat Islam...* hal. 42.



Jadi, berdasarkan paparan sederhana diatas jelaslah bahwa proses pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak punya keberdayaan baik karena kondisi internal(misalnya persepsi mereka sendiri)maupun karena kondisi eksternal (misalnya di tindas karena struktur social yang tidak adil).²⁰

Dengan demikian tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan social: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melakukan tugas tugas kehidupannya.²¹

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat...* hal. 60.

²¹ *Ibid*, hal. 59.



Pada akhirnya masyarakat mampu mandiri di semua aspek baik secara ekonomi, Politik, pendidikan dll, sehingga tercipta masyarakat madani yang di cita-citakan kita bersama.

3. Fokus Pemberdayaan

Dalam kajian Skripsi ini penulis memfokuskan kajian teoritis pemberdayaan sesuai dengan obyek yang di teliti yaitu :

a) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Apa yang di sampaikan Adam Smith ini telah dilupakan oleh para ekonom yang muncul kemudian dan konsep mengenai “modal” selalu di artikan sebagai modal yang bukan berupa sumber daya manusia. Pada sekitar tahun 1950-an, para ahli kembali mengkaji peranan sumberdaya manusia ini dalam suatu proses produksi. Bahkan pada waktu itu di anggap sebagai penemuan baru tanpa menyadari dua abad sebelumnya seorang ekonom terkemuka telah memberikan tanda-tanda.²²

Untuk mengetahui peningkatan sumberdaya manusia mudah dilakukan dengan melihat pada pertumbuhan penduduk. Tetapi tidak demikian halnya bila menyangkut kualitas sumber daya manusianya. Sangat sulit untuk mengetahuinya secara langsung. Salah satu pendekatan yang dapat di ketahui secara cepat adalah asumsi bahwa

²² Priyono Tjiptoherijanto, *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1989), hal. 1.



pendidikan dan latihan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.²³ antara lain:

a) Tujuan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia

Tujuan pemberdayaan manusia di arahkan untuk merubah sumberdaya manusia yang potensial tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa selama ini sering sumberdaya manusia ini masih belum di manfaatkan secara optimal.²⁴

Untuk mencapai tujuan jenjang pendidikan ini di perlukan jenjang pendidikan dan latihan secara bertahap dari kemampuan teknis untuk di kembangkan kearah kemampuan arah manajerial, diusahakan untuk meningkatkan derajat kesehatan maupun di arahkan pada menyiapkan tenaga-tenaga yang mampu menerima alih teknologi.²⁵

b) Manfaat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan Sumberdaya manusia tidak hanya pendidikan yang bersifat formal saja pelatihan kewirausahaan juga termasuk salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia juga. Dengan adanya pelatihan kewirausahaan hendaknya

²³ *Ibid*, hal. 2

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, hal. 3-4.



meningkatkan sumberdaya manusianya sehingga dapat memajukan usahanya.

Dengan begitu pelatihan kewirausahaan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, baik secara langsung dan tidak langsung menyangkut pekerjaan, maupun cara dan teknik menyelesaikan suatu tugas kerja tersebut secara tepat guna.²⁶

b) Pemberdayaan Ekonomi

Sayyidina Ali Bin Abi Thalib Ra. menyatakan “*Sekiranya kefakiran itu berwujud seorang manusia, sungguh aku akan membunuhnya*”.²⁷

Di dalam matra ekonomi dapat di lihat adanya perdagangan bebas dan kerjasama regional dan internasional. Perubahan sistem ekonomi ini tentu akan mengubah tata kehidupan dan tata ekonomi suatu masyarakat. Pemberdayaan ekonomi sangatlah penting untuk mengatasi problem ketidakberdayaan secara ekonomi. Persoalan yang serius di hadapi masyarakat adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar, serta tingkat kemiskinan yang terlampau menakutkan.

Pemberdayaan sosial-ekonomi ialah: usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Singkatnya,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Syaferi, *Pengembangan Masyarakat Islam...* hal. 44.



pemberdayaan sosial-ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial-ekonomi.

Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dan membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan wirausahawan baru. Asumsinya sederhana, kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian ekonomis.²⁸

4. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bisa dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu (1) partisipasi masyarakat dan (2) Pengorganisasian masyarakat. Kedua teknik ini merupakan konsep pemberdayaan yang berarti pembangunan harus bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat.²⁹

Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena pada dasarnya pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat maka masyarakat harus terlibat di dalamnya, sedangkan dalam pengorganisasian masyarakat, mungkin pada awalnya perlu ada fasilitator, baik dari instansi pemerintah (dinas sosial) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengorganisir dirinya sendiri sehingga tercipta system kemandirian.

²⁸ *Ibid*, hal. 47.

²⁹ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan...* hal. 6



Konsep pemberdayaan tidak hanya mengarah secara individual (*individual self-empowerment*), tetapi juga secara kolektif (*collective self empowerment*). Semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri dan keaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan perkataan lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur yang normative, structural dan substansial.

5. Strategi Pemberdayaan

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja di lakukan secara individual: meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektifitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sitem lain di luar dirinya. Dalam kontek pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arus atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.³⁰

Aras Mikro adalah pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melauai bimbingan, konseling, *stress menegement*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas –tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

Aras Mezzo adalah pemberdayaan di lakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan media kelompok

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat...* hal. 66



sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan Aras Makro adalah pendekatan ini di sebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan di arahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*.³¹

6. Model Pemberdayaan

Menurut Jack Rothman sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto bahwa, ada tiga model dalam praktek pemberdayaan masyarakat, dimana paradigma tersebut merupakan format ideal yang di kembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.³² antara lain :

a) Model Pengembangan Lokal (*Locallity Development Model*)

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang di tujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri lokal. Anggota masyarakat di pandang bukan sebagai sistem klien yang

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hal. 42.



bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.³³

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang di fasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada “tujuan proses” (*process goal*) daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (*task or product goal*). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, Peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari pengembangan masyarakat local yang bernuansa *bottom up* ini.³⁴

b) Model Perencanaan Sosial (*Social Planning Model*)

Perencanaan sosial disini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk dll.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 43-44.

³⁵ *Ibid.*



Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas” (*task goal*). Sistem klien perencanaan social umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial-ekonomi seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna sosial.

Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai “konsumen” atau “penerima pelayanan”. Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, dan pemecahan masalah bukanlah masalah prioritas, karena pengambilan keputusan di lakukan oleh para pekerja sosial, di lembaga lembaga formal semisal di lembaga formal, semisal lembaga kesejahteraan sosial pemerintah (Depsos) atau Swasta (LSM).³⁶

c) Model Aksi Sosial (*Social Action Model*)

Model ini menekankan tentang betapa pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak beruntung secara terorganisasi, terarah dan sistematis. Juga, meningkatkan kebutuhan yang memadahi bagi kebutuhan masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan social atau demokrasi. Model ini bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar di dalam lembaga utama atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Model aksi sosial ini menekankan pada pemerataan, kekuasaan dan sumber-

³⁶ *Ibid.*



sumbernya, atau dalam pembuatan keputusan masyarakat dan mengubah dasar kebijakan organisasi-organisasi formal.³⁷

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) sumber (*distribution resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan aksi sosial ini di dasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi ‘korban’ ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena di miskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak di berdayakan, oleh kelompok elit yang menguasai sumber-sumber ekonomi politik dan kemasyarakatan.

Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat di organisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality* dan keadilan).³⁸

Secara sederhana, ketiga model tadi dapat di jabarkan demikian:

1. Model pengembangan lokal berasumsi bahwa perubahan masyarakat dapat di dorong secara optimal bila partisipasi berbagai lapisan dan golongan

³⁷ Harry Hikmat, *Strategi pemberdayaan masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), hal. 70.

³⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat...* hal. 44-45.



diikutsertakan dalam mengidentifikasi kebutuhan , menetapkan pilihan, merencanakan dan melaksanakan

2. Model perencanaan sosial menekankan perlunya kemampuan keahlian dalam memecahkan masalah seperti kenakalan remaja, perumahan dan sebagainya.
3. Model pendekatan aksi sosial menekankan memberi tekanan pada masalah kelompok terrugikan (*disanvantage groups*), seperti masalah golongan penduduk berpendapatan rendah, anak terlantar, pengangguran dan sebagainya.

B. Peran dan Partisipasi Perempuan Di Dalam Masyarakat

1. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam bukunya Anwar adalah Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dengan adanya partisipasi dapat meningkatkan kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka



dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.³⁹

Di dalam matra ekonomi dapat di lihat adanya perdagangan bebas dan kerjasama regional dan internasional. Perubahan sistem ekonomi ini tentu akan mengubah tata kehidupan dan tata ekonomi suatu masyarakat. Pemberdayaan ekonomi sangatlah penting untuk mengatasi problem ketidakberdayaan secara ekonomi. Persoalan yang serius di hadapi masyarakat adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar, serta tingkat kemiskinan yang terlampau menakutkan.

Pembangunan ekonomi memiliki dampak-dampak yang berbeda atas kaum laki laki dan perempuan. Minat yang semakin tinggi akan relasi antara gender dan pembangunan untuk sebagian besar di pelopori oleh terbitnya karya terobosan dari Ester Boserup berjudul *Woman's Role in Economic Development* (1970). Dalam buku ini Boserup menandakan bahwa pembagian kerja berdasar jenis kelamin berbeda-beda di seantero dunia, Di eropa kaum perempuan sering memainkan peran utama dalam produksi ekonomi. Hal ini berbeda dengan perempuan di Afrika, kaum perempuan di afrika di kucilkan dan memainkan peran tidak berarti dalam produksi (suatu pengandaian yang dalam kenyataannya tidak berdasar).⁴⁰

³⁹ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan...* hal. 13

⁴⁰ Naqiyah dan Najlah, *Otonomi Perempuan*, (Malang: Banyumedia, 2000), hal. 87.



Secara ekonomis pria lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan daripada wanita akan tetapi dewasa ini kaum perempuan yang berkeluarga cenderung memilih berperan ganda. Berkarir di sektor publik oleh sebagian ibu dianggap suatu keharusan, walaupun kebutuhan mereka telah tercukupi. Hal ini disebabkan karena aktivitas di sektor domestik masih dianggap sebagai perlakuan pensubordinasian. Anak-anak cukup dipercayakan kepada para pembantu. Karir dan rumah tangga adalah peran lain pilihan ibu. Ia punya obsesi keduanya harus berjalan sukses. Karir terus menanjak, dan anak-anak di rumah tidak kehilangan kasih sayangnya. Namun peran ini sangat sulit untuk dimainkan dan sangat berat. Biasanya dalam perjalanan waktu akan ada dilema yang dihadapi ibu karena keduanya berbenturan dan saling menuntut prioritas dari perhatiannya.⁴¹

Sementara itu ibu lain memilih tidak berkarir sama sekali. Akan tetapi ketika di rumah waktunya dihabiskan untuk aktivitas yang tak ada kaitannya dengan pendidikan anak, seperti arisan, nonton telenovela, ngerumpi dengan tetangga dan sebagainya. Dan tipe terakhir adalah ibu yang menilai kualitas dan kuantitas sama pentingnya dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu ia akan mendidik anaknya dengan menjaga kualitas dan mengupayakan kuantitas secara baik. Pendidikan anak menjadi fokus baginya. Tak menjadi soal apakah ia berperan hanya sebagai ibu rumah tangga saja atau berperan ganda.

⁴¹ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan...* hal. 6



Dalam kajian perempuan Indonesia dulu dan kini Evelyn Suleeman dkk. Mengatakan bahwa: Perempuan di sektor informal menjadi tumpuan keluarga. meskipun mereka menunjang perekonomian kaum miskin dan menengah baik di masyarakat maupun di tempat kerja, kehadiran mereka secara resmi belum di anggap dan tidak di perhitungkan.⁴²

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1)

⁴² Evelyn Suleeman, dkk, *Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), hal. 246.



- pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
- f) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan Sumberdaya Manusia; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.⁴³

⁴³ Sumodiningrat dan Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 56.



2. Partisipasi Perempuan dalam Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM)

Tujuan pemberdayaan manusia di arahkan untuk merubah sumberdaya manusia yang potensial tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa selama ini sering sumberdaya manusia ini masih belum di manfaatkan secara optimal khususnya bagi perempuan.⁴⁴

Untuk meningkatkan sumberdaya manusia perempuan, maka perlu penggalangan kepedulian pada pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal (pelatihan kewirausahaan) menjadi kunci pembebasan kaum perempuan dari kebodohan. Perempuan dengan pendidikan rendah akan memperoleh lapangan pekerjaan kasar dan syarat dengan kekerasan, eksploitasi, dan kapitalisasi perempuan. Budaya patrialistik yang memihak pada laki laki telah menyebabkan rendahnya kesadaran kaum perempuan untuk berkreatifitas. Lemahnya kesadaran perempuan akan hak hak reproduksi, menyebabkan maraknya praktik praktik aborsi, prostitusi, dan tindak kekerasan secara fisik dan seksual terhadap perempuan.

3. Partisipasi Perempuan dalam Kesehatan

Untuk menelaah situasi wanita dalam pembangunan kesehatan, di gunakan indikator yang berkaitan dengan fungsi humanis-sosial, fungsi produktif dan fungsi reproduktifnya.⁴⁵

⁴⁴ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan...* hal. 7

⁴⁵ Tapi Omas Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 263.



Pada dasarnya, dapat di kemukakan bahwa wanita berperan sebagai sasaran/obyek sekaligus sebagai petugas pelaksana /subyek dalam pembangunan kesehatan. Untuk menilai situasi wanita sebagai sasaran pembangunan kesehatan, di gunakan indikator status kesehatan wanita yang meliputi angka kematian bayi (wanita), umur harapan hidup (wanita), angka kematian ibu/maternal, status gizi dari angka kesakitan, serta angka produktifitas wanita.⁴⁶

Menurut Ihromi bahwa, perempuan dalam keluarga berpenghasilan rendah memiliki potensi yang terbatas untuk meningkatkan derajat kesehatan diri dan keluarganya, di sebabkan kemiskinan dan sering menyita waktunya untuk mencari penghasilan tambahan yang mengalami kesulitan karena pendidikan terbatas, dan situasi semakin memburuk bila perempuan itu merupakan kepala keluarga.⁴⁷

Budaya patrialistik yang memihak pada laki laki telah menyebabkan rendahnya kesadaran kaum perempuan untuk berkreatifitas. Lemahnya kesadaran perempuan akan hak hak reproduksi, menyebabkan maraknya praktik praktik aborsi, prostitusi, dan tindak kekerasan secara fisik dan seksual terhadap perempuan.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan...* hal. 7.



C. Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha memungkinkan perempuan sehingga dapat bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan perempuan baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan dll. Memberdayakan perempuan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dan marginalisasi.

Dalam konteks gender pemberdayaan perempuan adalah : memberi suatu kemungkinan yang menjadi terbaik untuk perempuan, Karena adanya potensi diri yang memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Gerakan pemberdayaan ini muncul disebabkan oleh ketidakberdayaan (*powerless*) kaum perempuan dalam menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak yang menjadi korban sosial dan peralihan industri dalam pembangunan kita. Dalam hal ini gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan agar mendapat prioritas sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.⁴⁸

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan ini hakekatnya diarahkan kepada peningkatan kedudukan, peran kemampuan, kemandirian serta ketahanan spiritual agar menjadi mitra sejajar pria yang selaras, serasi, seimbang sebagai

⁴⁸ Evelyn Suleeman, dkk, *Perempuan Indonesia...* hal. 247-248



bagian-bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Ada tiga strategi pemberdayaan perempuan yaitu aras mikro, mezzo, dan makro. Akan tetapi peneliti menfokuskan strategi dalam aras mezzo hal itu di sesuaikan dengan hasil yang di peroleh peneliti di lapangan. Strategi aras mezzo adalah pemberdayaan di lakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan media kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.⁴⁹

Strategi pemberdayaan perempuan, meliputi perhatian di tujukan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan yang tergolong dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Mark G. Hanna dan Buddy Robinson, ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu :

Tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi *direct action* membutuhkan

⁴⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat...* hal. 44-45.



dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari segi sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.⁵⁰

D. Pemberdayaan Perempuan Dalam Konteks Gender

Menurut George Ritzer dan Douglas J. Goodman tentang teori feminisme memberikan enam proposisi sebagai basis untuk revisi teori sosiologi standar. Yaitu:⁵¹

1. praktik teori sosiologi harus berdasarkan sosiologi pengetahuan yang mengakui keberpihakan dari semua pengetahuan, mengakui orang yang mengetahui (*knower*) sebagai pihak yang ditempatkan secara sosial dan mengakui fungsi kekuasaan dalam mempengaruhi apa-apa yang akan menjadi pengetahuan.
2. Struktur sosial makro didasarkan atas proses yang dikendalikan oleh kelompok dominan yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dan dilaksanakan oleh kelompok yang ditundukkan (*subordinate*) yang pekerjaannya sebagian besar dibuat menjadi tak kelihatan dan kurang bernilai, bahkan di mata mereka sendiri, oleh ideologi sosial. Jadi, pihak dominan merampas dan mengontrol kerja produktif dari masyarakat, bukan

⁵⁰ Harry Hikmat, *Strategi pemberdayaan masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), hal. 19

⁵¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Terjemahan Alhamdan Santoso dan Triwibowo Budi, *Teori sosiologi modern*(Jakarta, Prenada Media Group, 2007) hal. 468



hanya produksi ekonomi tetapi juga kerja reproduksi sosial oleh perempuan.

3. Proses interaksi mikro dalam masyarakat membuat susunan kekuasaan dominasi subordinasi menjadi nyata, dan susunan ini ditafsirkan secara berbeda oleh aktor yang kuat dan aktor yang lemah (*subordinate*).
4. kondisi-kondisi ini menciptakan kesadaran yang terbelah di dalam subjektivitas perempuan di sepanjang garis kesalahan (*line of fault*) yang diciptakan oleh penjajaran (*juxtaposition*) ideologi patriaki dan pengalaman aktualitas perempuan dalam kehidupan mereka.
5. apa yang telah dikatakan tentang wanita mungkin dapat diterapkan untuk semua orang yang ditundukkan dalam bentuk yang sejajar, walaupun tidak dalam bentuk yang identik.
6. orang harus mempertanyakan kegunaan setiap kategori yang dikembangkan oleh ilmu yang pada dasarnya didominasi lelaki, terutama kategori yang membagi antara sosiologi-mikro dan sosiologi-makro

Sebagian perdebatan mengenai ihwal pemberdayaan memiliki asal muasalnya dalam pengakuan pentingnya persoalan persoalan gender dalam pembangunan. Kita sudah melihat bahwa selama dasawarsa 1970-an, relasi-relasi gender semakin diakui sebagai perkara pokok dalam menentukan akses masyarakat ke berbagai sumberdaya, serta cara-cara dalamnya mereka mengalami pembangunan.⁵²

⁵² David Lewis, 2005, *Antropologi Pembangunan Dan Tantangan Pasca Modern*, Seminar Tinggi, Jakarta, hal. 202.



Secara normatif, kedudukan wanita dan pria adalah sejajar. akan tetapi, dalam kehidupan nyata seringkali terendap apa yang lazim disebut dengan istilah *gender stratification* yang menempatkan status wanita dalam tatanan hierarkis pada posisi subordinan atau tidak persisi sejajar dengan posisi kaum pria. Tatanan hierarkis demikian antara lain ditandai oleh kesenjangan ekonomi (perbedaan akses pada sumber-sumber ekonomi) dan sekaligus kesenjangan politik (perbedaan akses pada peran politik).⁵³

Dibandingkan dengan wanita, pria memperoleh akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. Secara ekonomis, pria lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan daripada wanita. Sedangkan secara politis, pria lebih banyak menempati posisi-posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perjuangan wanita untuk mencapai puncak strata sosial lebih berat dan berliku-liku. Tentu saja, kecenderungan semacam itu tidak melekat disetiap masyarakat. Namun bahwa kecenderungan itu terjadi disebagian besar negara berkembang.⁵⁴

Konsep dari gender itu sendiri adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, sehingga sifat itu bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain

⁵³ Mayling Oey-Gardiner, *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), hal. 248

⁵⁴ *Ibid.*



maupun suatu kelas, misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa, tetapi sifat itu dapat dipertukarkan.

Sedangkan identitas gender adalah suatu perasaan subyektif tentang keberadaan dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang merupakan bagian penting dari konsep diri seseorang. Identitas gender itu bertumpu pada hubungan laki-laki perempuan yang *asimetris*, karena aspek biologis antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, sehingga stereotipe antara laki-laki dan perempuan tentang apa yang dianggap pantas (sikap dan perilaku) juga berbeda, makna stereotipe itu adalah suatu konsep yang berkaitan dengan peran tetapi berbeda.⁵⁵

Karena stereotipe merupakan suatu generalisasi tentang sifat-sifat yang dianggap memiliki oleh orang-orang tertentu yang didukung oleh fakta obyektif. Sedangkan peran adalah pola perilaku yang ditentukan bagi seorang yang mengisi kedudukan tertentu. Kedudukan itu mengisi peran seksual tertentu yang tergantung dari lingkungan budaya, tingkatan sosial, ekonomi, usia, agama dan lain sebagainya.

Identitas gender yang terbentuk di atas disebabkan oleh dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural karena itu pun gender dapat berubah sewaktu-waktu, seperti terjadi pada perubahan sifat-

⁵⁵ Mansour Fakih, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal. 33



sifat yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Sedangkan tugas analisis gender untuk mengatasi perbedaan yang terjadi seperti di atas.

Pendekatan pemberdayaan dalam konteks gender adalah: pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, serta menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam arti ada pengakuan makna produktif terhadap aktivitas perempuan meskipun dilakukan dalam rumah tangga sepanjang dapat menambah pendapatan rumah tangga, pembangunan organisasi perempuan, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat sebagai syarat penting perubahan sosial berkelanjutan bagi perempuan.⁵⁶

Pada umumnya di negara ketiga banyak wanita yang menjadi kepala rumah tangga, rendahnya kesempatan dan kapasitas mereka dalam mencetak pendapatan mereka sendiri, serta terbatasnya kontrol mereka terhadap penghasilan pada suami, merupakan sebab-sebab pokok fenomena yang amat memprihatinkan tersebut. Selain itu akses kaum perempuan ternyata juga sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, tunjangan-tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan kerja yang telah dilancarkan oleh pemerintah. Kenyataan itu mempersempit sumber-sumber keuangan bagi mereka, sehingga posisi mereka secara finansial jauh kurang stabil apabila di bandingkan dengan kaum pria.⁵⁷

⁵⁶ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan...* hal. 191

⁵⁷ *Ibid.*



Pembangunan ekonomi memiliki dampak-dampak yang berbeda atas kaum laki laki dan perempuan. Minat yang semakin tinggi akan relasi antara gender dan pembangunan untuk sebagian besar di pelopori oleh terbitnya karya terobosan dari Ester Boserup berjudul *Woman's Role in Economic Development* (1970). Dalam buku ini Boserup menandakan bahwa pembagian kerja berdasar jenis kelamin berbeda-beda di seantero dunia, Di eropa kaum perempuan sering memainkan peran utama dalam produksi ekonomi. Hal ini berbeda dengan perempuan di Afrika, kaum perempuan di afrika di kucilkan dan memainkan peran tidak berarti dalam produksi (suatu pengandaian yang dalam kenyataannya tidak berdasar).⁵⁸

Pemberdayaan perempuan adalah: memberi suatu kemungkinan yang menjadi terbaik untuk perempuan, Karena adanya potensi diri yang memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Gerakan pemberdayaan ini muncul disebabkan oleh ketidakberdayaan (*powerless*) kaum perempuan dalam menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak yang menjadi korban sosial dan peralihan industri dalam pembangunan kita. Dalam hal ini gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan agar mendapat prioritas sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.⁵⁹

⁵⁸ Naqiyah dan Najlah, *Otonomi Perempuan*, (Malang: Banyumedia, 2000), hal. 87.

⁵⁹ Mailing Oey-Gardiner, *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini...* hal.247-248



E. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberdayaan

Ketika keterbatasan-keterbatasan dari pembangunan yang di sponsori oleh negara, dan berciri proyek serta, berkiblat dari atas kebawah menjadi gamblang, maka pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an mulai tersaksikan kian meningkatnya perhatian yang terpusat pada organisasi-organisasi pembangunan swasta yang professional serta sector relawan oleh badan-badan pembangunan. Apa yang di sebut sector ketiga ini kini secara luas di pandang sebagai sektor yang memuat alternatif- alternatif potensial dan dapat di andalkan berhadapan dengan pendekatan-pendekatan konvensional atas kegiatan pembangunan dan bantuan.⁶⁰

Pada satu sisi tingkat perubahan atas dukungan yang diberikan kepada berbagai LSM menyiratkan suatu pergeseran penting dalam praktik pembangunan, karena banyak jumlah dana yang disalurkan kepada organisasi-organisasi yang berada diluar “ arus utama ” yang seringkali menawarkan pendekatan-pendekatan baru lagi radikal atas cara bagaimana kegiatan “ pembangunan ” itu dilaksanakan. Hal ini bersama dengan keragaman pendekatan dalam sektor LSM, sekali lagi bahwa wacana pembangunan itu tidak seragam dan tidak bisa di bekukan secara tegas. Akan tetapi, pada saat yang sama ada lontaran kritik bahwa penambahan untuk belbagai LSM oleh Badan_Badan

⁶⁰ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi...* hal. 315.



Bantuan Utara tidak menyanggupkan mereka untuk mengubah agenda, tetapi membawa serta ancaman potensial untuk mengontrol berbagai LSM tersebut.⁶¹

Baik di Utara maupun Selatan, pengaruh LSM itu kian meningkat ketika agenda-agenda swastanisasi memangkas peran negara dalam menyediakan jasa serta pelayanan. Banyak lembaga pembangunan kini menggalakkan keyakinan bahwa berbagai LSM itu memiliki kekuatan tertentu oleh karena fleksibilitasnya yang berasal dari kegiatan-kegiatannya yang berskala kecil, tingkat partisipasi dari para “klien” mereka, serta daya tular dari berbagai prakarsanya. Banyak lembaga donor yang kini mengarahkan semakin banyak anggarannya untuk berbagai LSM ketimbang untuk badan-badan pemerintahan.⁶²

LSM telah menjadi karakteristik pendekatan alternatif terhadap kegagalan pembangunan industri dan paternalistik *top down* terhadap kemiskinan, masalah wanita dan sebagainya di tingkat *grassroot* berskala kecil. Pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan sebagai pola potensial dalam strategi alternatif bagi pembangunan masyarakat itu sendiri. Asumsi dasarnya untuk membangun adalah harus didasarkan pada pemberdayaan masyarakat.⁶³

Karina Conestantino David melakukan penelitian di Amerika Latin dan Filipina, bahwa para sukarelawan atau LSM yang menjadi agen sponsor pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap sektor publik secara

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Harry Hikmat, *Strategi pemberdayaan masyarakat...* hal. 11.



kontras berbeda dengan kesejahteraan dibidang ekonomi. LSM tersebut di kenal sebagai agen pembangunan di tingkat *grassroot* dalam organisasi masyarakat. Tipe organisasi relawan atau LSM di fokuskan pada kemandirian dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan, jaringan kerja, dan kampanye yang menggunakan pendekatan strategis dalam pembangunan melalui partisipasi masyarakat ditingkat lokal dan regional.⁶⁴

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi karya Husin yang berjudul “Muslimat NU dan Pemberdayaan Perempuan (Membangun Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan Sebagai Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”.

Dalam skripsi ini dibahas usaha organisasi Muslimat NU dalam meningkatkan kehidupan ke taraf yang lebih baik dalam ruang lingkup meliputi pengembangan kehidupan manusia dengan membangun kemitrasejajaran fungsi laki-laki dan perempuan dalam menjamin kehidupan. Usaha usaha yang dilakukan adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dengan cara membentuk dan mendirikan koperasi dan konveksi, mengikut andilkan perempuan dalam kegiatan parpol untuk di delegasikan sebagai wakil perempuan yang dapat dijadikan sebagai tangan kanan dalam setiap kebijakan yang diambil, serta memupuk rasa ketaqwaan

⁶⁴ *Ibid.*



dan mempererat hubungan antar manusia dan sang kholiq, yang mana kegiatan ini dilakukan melalui jam'iyah dan majlis ta'lim.

2. Skripsi karya Herdian Nur Aviva yang berjudul “Studi Tentang Program Pemberdayaan Fatayat NU Cabang Kota Mojokerto Melalui KBU (Kelompok Belajar Usaha) Dalam Meningkatkan Ketrampilan Perempuan Putus Sekolah

Dalam skripsi ini dibahas usaha organisasi Fatayat NU untuk membangkitkan kaum wanita terutama anggota fatayat nu sendiri agar dapat keluar dari keterbatasan budayanya, serta turut beramal demi masyarakatnya. Usaha usaha yang dilakukan adalah pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi dengan cara memberikan pelatihan berupa ketrampilan membuat pupuk dan pemberian modal kepada peserta pelatihan.

Adapun perbedaan antara dua penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah difokus rumusan masalah, hasil pemberdayaan dan lokasi penelitian.